



Analisis Linguistik Forensik terhadap Ujaran Kebencian dalam Pernyataan Anggota DPR dan Menteri RI di Media Publik

Fathiya Ilma Shabrina¹, Roma Kyo Kae Saniro^{2,3}, Adelia Novera³,
Fathyyah Adelia Ramadhani⁴, Roffifah Putri Yusriah⁵,
Kayla Aliya Fitra⁶, Sasta Febriyanti⁷, Amanda Zaskia⁸

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia

E-mail: romakyokae@hum.unand.ac.id

Article Info

Article history:

Received January 01, 2026

Revised January 10, 2026

Accepted January 11, 2026

Keywords:

Hate speech, Public officials,
Forensic linguistics, Dictions.

ABSTRACT

Social media has become a public sphere that enables direct interaction between public officials and citizens, yet it also contributes to the rise of hate speech that often originates from influential public figures. This study aims to identify and analyze hate speech used by public officials on the TikTok platform through a forensic linguistic legal approach. The research employs a qualitative descriptive method with data collected through observations of posts, comments, and public statements containing elements of insult, labeling, sarcasm, and dehumanization. Analysis of 15 data samples indicates that public officials frequently use derogatory diction that constructs an unequal power relation between them and the public, particularly toward groups such as demonstrators, lower-class communities, and certain geographic regions. The rapid and viral nature of TikTok facilitates the widespread dissemination, imitation, and normalization of hate speech by public figures, thereby expanding the cycle of hostility, intensifying social polarization, and reducing public trust in state institutions. These findings highlight the importance of ethical awareness in language use among public officials and underscore the need to strengthen communication ethics, language regulation, and digital literacy to foster a more courteous, democratic, and dignified political communication environment.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received January 01, 2026

Revised January 10, 2026

Accepted January 11, 2026

Keywords:

Ujaran Kebencian, Pejabat
Publik, Linguistik Forensik,
Diksi.

ABSTRACT

Media sosial telah menjadi ruang publik yang memungkinkan interaksi langsung antara pejabat publik dan masyarakat, tetapi sekaligus mendorong meningkatnya ujaran kebencian yang sering kali justru berasal dari figur publik. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis ujaran kebencian yang digunakan oleh pejabat publik di platform TikTok melalui pendekatan linguistik forensik hukum. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi terhadap unggahan, komentar, dan pernyataan publik yang mengandung unsur penghinaan, pelabelan, sarkasme, dan dehumanisasi. Analisis terhadap 15 data menunjukkan bahwa pejabat publik kerap menggunakan diksi bernada merendahkan yang membangun relasi kuasa timpang antara mereka dan masyarakat, terutama kelompok seperti demonstran, masyarakat kelas bawah, dan wilayah geografis tertentu. Karakteristik TikTok yang cepat dan viral membuat ujaran kebencian dari tokoh publik mudah tersebar, ditiru, dan dinormalisasi, sehingga memperluas lingkaran kebencian, memperkeras polarisasi, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Temuan ini menegaskan pentingnya



kesadaran etis dalam penggunaan bahasa oleh pejabat publik serta perlunya penguatan etika komunikasi, regulasi bahasa, dan literasi digital untuk menciptakan ruang komunikasi politik yang lebih beretika, demokratis, dan bermartabat.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Roma Kyo Kae Saniro
Fakultas Hukum Universitas Andalas
Email: romakyokae@hum.unand.ac.id

PENDAHULUAN

Media sosial telah bertransformasi menjadi ruang publik baru yang memfasilitasi interaksi antara berbagai lapisan masyarakat, termasuk antara para pemangku jabatan publik dan konstituennya. Platform seperti X (sebelumnya Twitter), Instagram, Facebook, dan TikTok tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi resmi, tetapi juga sebagai medium bagi pejabat publik untuk mengekspresikan opini serta menanggapi isu sosial dan politik secara langsung. Dalam konteks komunikasi politik yang demokratis, interaksi di ruang digital seharusnya dilandasi oleh prinsip kesantunan berbahasa dan penghormatan terhadap martabat setiap warga negara.

Namun, realitas yang terjadi sering kali jauh dari ideal. Ruang digital kini kerap menjadi arena penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*), termasuk oleh figur publik yang memiliki pengaruh besar terhadap opini masyarakat. Syarif (2019, hlm. 123) mendefinisikan ujaran kebencian sebagai aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap pihak lain dalam bentuk provokasi, hasutan, atau penghinaan berdasarkan ras, agama, etnis, warna kulit, atau status sosial tertentu. James (dalam Bank, 2011, hlm. 239) menegaskan bahwa media sosial menjadi medium yang subur bagi penyebaran ujaran kebencian karena sifatnya yang cepat dan sulit dikontrol, sehingga sering kali menimbulkan kesalahpahaman massal. Sejalan dengan itu, Koncavar (2013, hlm. 675) menjelaskan bahwa ujaran kebencian dapat muncul secara terang-terangan maupun terselubung, seperti dalam bentuk rasisme, diskriminasi agama, xenofobia, homofobia, dan bentuk intoleransi lainnya.

Perkembangan teknologi informasi memperkuat posisi media sosial sebagai saluran utama penyebaran ujaran kebencian. Platform seperti TikTok, dengan fitur *duet*, *stitch*, dan algoritma *for you page*, memungkinkan penyebaran video berpotensi viral dan menjangkau jutaan pengguna dalam waktu singkat (Rahardaya, 2021). Kondisi ini membuat ujaran kebencian mudah tersebar luas, termasuk yang berasal dari pejabat publik atau politisi yang pernyataannya sering menjadi sorotan masyarakat.

Fenomena ini menjadi lebih serius ketika ujaran kebencian justru dilontarkan oleh pejabat publik yang seharusnya menjadi teladan dalam beretika berkomunikasi. Beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan menteri tercatat pernah menyampaikan pernyataan dengan diksi yang bermuatan kebencian dan pelecehan terhadap masyarakat. Misalnya, penggunaan frasa seperti “rakyat jelata” yang berkonotasi merendahkan serta “rakyat tolo!” yang secara eksplisit mengandung penghinaan terhadap kecerdasan masyarakat. Penggunaan diksi semacam ini tidak dapat dianggap sepele karena memiliki implikasi sosial dan politik yang luas.

Menurut Amalia (2021), bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga cerminan kekuasaan. Pilihan kata yang digunakan oleh individu dengan posisi dominan, seperti pejabat



negara, dapat memperkuat atau justru meruntuhkan hubungan sosial. Ketika pejabat menggunakan bahasa yang merendahkan, dampaknya bukan hanya melukai perasaan masyarakat, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap institusi negara. Senada dengan itu, Halili dan Kurnia (2022) menemukan bahwa ujaran kebencian dari elit politik memiliki efek yang lebih berbahaya karena dapat dinormalisasi dan ditiru oleh para pendukungnya, sehingga memperluas lingkaran wacana kebencian di ruang digital.

Konteks ini semakin krusial mengingat tingginya tingkat partisipasi digital masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), penetrasi internet di Indonesia telah mencapai sekitar 78% dari total populasi, dengan media sosial sebagai platform yang paling banyak diakses. Artinya, setiap kata yang diucapkan oleh pejabat publik di ruang digital memiliki potensi viral dan dapat dikonsumsi oleh jutaan pengguna dalam waktu singkat, sehingga dampaknya terhadap opini publik sangat signifikan.

Dengan demikian, diperlukan kajian ilmiah yang mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan memaknai diksi bermuatan kebencian yang digunakan oleh pejabat publik, khususnya yang tersebar melalui platform seperti TikTok. Melalui pendekatan linguistik forensik hukum, penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk, konteks, serta implikasi hukum dari ujaran kebencian yang dilakukan oleh pejabat publik di ruang digital. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman etika berbahasa dalam komunikasi politik, sekaligus menjadi dasar refleksi bagi para pemangku kebijakan untuk membangun wacana politik yang lebih bermartabat, etis, dan berorientasi pada pemulihan kepercayaan publik.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Penggunaan metode penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai fenomena ujaran kebencian yang ditujukan kepada anggota politik di ruang media sosial *tiktok*. Menurut Nasution, penilaian kualitatif adalah penilaian yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap perilaku atau proses, kemudian dideskripsikan secara subjektif berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Sumber data diperoleh melalui pencatatan data dari platform media sosial TikTok yang dipilih sebagai objek penelitian. Wujud data penelitian ini berupa contoh unggahan, komentar, atau pernyataan publik yang mengandung unsur ujaran kebencian, yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi bentuk, pola, dan konteks kemunculannya. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung berbagai bentuk interaksi, komentar, serta konten yang mengandung potensi ujaran kebencian terhadap anggota politik di platform TikTok. Proses observasi dilakukan pada unggahan video, kolom komentar, serta fitur interaksi lain seperti siaran langsung atau duet yang berkaitan dengan isu politik.

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan bahasa oleh pejabat publik di media sosial, khususnya TikTok, menunjukkan kecenderungan kuat terhadap pelanggaran etika komunikasi melalui pemilihan diksi bermuatan ujaran kebencian. Analisis terhadap 15 data memperlihatkan adanya pola penghinaan, pelabelan, sarkasme, dan dehumanisasi yang diarahkan kepada kelompok atau individu tertentu, termasuk demonstran, pekerja, masyarakat kelas bawah, bahkan wilayah geografis. Bahasa yang digunakan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian gagasan, tetapi juga sebagai alat kekuasaan yang menempatkan pejabat pada posisi superior dan menekan pihak yang dianggap berseberangan. Bentuk tindak tutur yang muncul menegaskan adanya relasi kuasa dan representasi sosial yang timpang antara pejabat publik dengan masyarakat umum.



Temuan tersebut memiliki implikasi sosial dan politik yang signifikan. Karakteristik media sosial yang viral dan sulit dikontrol membuat ujaran kebencian dari tokoh publik mudah dinormalisasi, direproduksi, serta ditiru oleh pengikutnya, sehingga memperluas lingkaran kebencian di ruang digital. Akibatnya, kualitas komunikasi politik menurun, polarisasi sosial semakin menguat, dan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan berpotensi menurun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berfokus pada analisis penggunaan diksi bermuatan kebencian yang digunakan oleh pejabat publik, khususnya yang tersebar melalui platform TikTok. Temuan-temuan dari penelitian ini menunjukkan adanya penggunaan diksi yang selain menyalahi etika komunikasi, juga mencerminkan bagaimana pemerintah memandang masyarakat.

Data 1



Gambar 1. Data 1

Transkrip: “Orang yang cuma mental bilang bubarin dpr itu adalah orang tolol sedunia”

KBBI:

1. Mental: Bersangkutan dengan batin dan watak manusia, yang bukan bersifat badan atau tenaga
2. Bubarin: selesai; bercerai ke mana-mana; ditiadakan
3. Tolol: sangat bodoh; bebal

Pragmatik: Mengandung serangan verbal pada kelompok yang mengkritik DPR.

Situasi dan kondisi:

- Muncul dalam konteks ketegangan antara publik dan lembaga legislatif (DPR)
- Kondisi menunjukkan polaritas antara rakyat dan pejabat publik dan adanya ketidakpuasan publik terhadap kinerja DPR.

Tujuan: Menegaskan posisi kuasa DPR sebagai lembaga yang tidak boleh dipertanyakan.

Teori:

- *Hate Speech*: Ujaran mengandung makian, termasuk kategori *insulting/abusive language*.
- Tindak Tutur Ekspresif dan Direktif:



- a. Ekspresif: pembicara menyatakan emosi negatif
- b. Direktif implisit: mengarahkan audiens agar tidak menganggap serius wacana pembubaran DPR.
- Analisis Wacana Kritis (AWK/*Fairclough*): Ucapan ini membentuk wacana bahwa kritik terhadap DPR adalah tindakan tidak masuk akal.

Data 2



Gambar 2. Data 2

Transkrip: “Dheninda Chaerunnisa diduga mengejek demonstran saat melakukan orasi”

KBBI:

1. Mengejek: Mengolok-olok (menertawakan, menyindir) untuk menghinakan
2. Demonstran: Orang yang berdemonstrasi
3. Orasi: Pidato

Pragmatik: Ujaran ini merupakan laporan evaluatif yang menunjukkan tindakan negatif (mengejek) dari seorang tokoh terhadap kelompok demonstran.

Situasi dan kondisi:

- Muncul ketika terjadi aksi demonstrasi yang biasanya melibatkan ketegangan antara masyarakat dan pemerintah/lembaga tertentu.
- Ujaran ini sering muncul dalam konteks media sosial, ketika publik menyoroti perilaku pejabat atau wakil rakyat.
- Situasinya menunjukkan relasi kuasa (pejabat/tokoh publik vs demonstran).

Tujuan:

- Mengkritik tindakan tokoh yang dianggap mengejek demonstran.
- Membangun citra negatif tentang figur tersebut, seolah tidak menghargai aspirasi rakyat.

Teori:

- Tindak Tutur Ekspresif: menunjukkan sikap negatif berupa ejekan terhadap demonstran.
- Analisis Wacana Kritis (AWK): menggambarkan relasi kuasa, di mana tokoh publik merendahkan kelompok masyarakat.



- Representasi membentuk citra demonstiran sebagai pihak yang layak diejek atau tidak valid.

Data 3



Gambar 3. Data 3

Transkrip: “Ketika DPR dibandingkan dengan rakyat jelata, yang, katakan tukang becak atau buruh, disitu Anda mengalami sesat logika”

KBBI:

1. Tukang becak: Orang yang bekerja sebagai pengemudi becak
2. Buruh: Orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah
3. Rakyat jelata: Rakyat biasa (bukan bangsawan)
4. Sesat: Tidak melalui jalan yang benar
5. Logika: Jalan pikiran yang masuk akal

Pragmatik:

- Ujaran bersifat etiketisasi (labeling) terhadap kelompok pekerjaan tertentu.
- Mengandung nada merendahkan karena menghubungkan profesi dengan status sosial rendah.

Situasi dan kondisi:

- Muncul dalam konteks pembahasan kelas sosial atau pernyataan politik.
- Berkaitan dengan sensitivitas publik tentang penghargaan terhadap profesi dan ketimpangan sosial.

Tujuan:

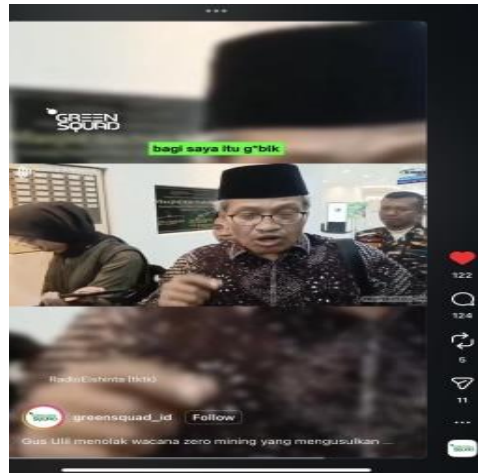
- Menjelaskan pandangan pembicara tentang struktur kelas sosial
- Memperkuat narasi bahwa profesi tertentu berada dalam kelas ekonomi rendah.

Teori:

- Tindak Tutur Representatif: menyampaikan pandangan pembicara mengenai status sosial.
- AWK: menunjukkan relasi kuasa dan pengonstruksian kelas sosial.
- Representasi: membentuk citra tukang becak/buruh sebagai “kelas bawah” melalui bahasa.



Data 4



Gambar 4. Data 4

Transkrip: “jadi kalau ada orang kok pandangannya *zero mining*, bagi saya itu goblok”

KBBI:

1. Pandangan: cara seseorang melihat, menilai, atau memikirkan suatu
2. Goblok (adj, informal, kasar): bodoh sekali; tidak cerdas; digunakan untuk merendahkan intelektualitas seseorang

Pragmatik: Ujaran bersifat menghina, agresif secara verbal, dan mengandung evaluasi negatif yang merendahkan intelektualitas kelompok yang mendukung kebijakan *zero mining*.

Situasi dan kondisi :

- Video menunjukkan wawancara di area publik
- Gus Ulil memberikan tanggapan spontan terhadap usulan sebagian pihak mengenai kebijakan *zero mining*.
- Wacana ini berkaitan dengan isu energi, ekonomi, dan lingkungan, yang sering menimbulkan perdebatan.
- Ekspresi wajah dan intonasi memperlihatkan ketidaksetujuan kuat dan nada mengecam.
- Audiens sekitar tampak mencatat atau merekam, sehingga konteksnya adalah dialog dengan media.

Tujuan:

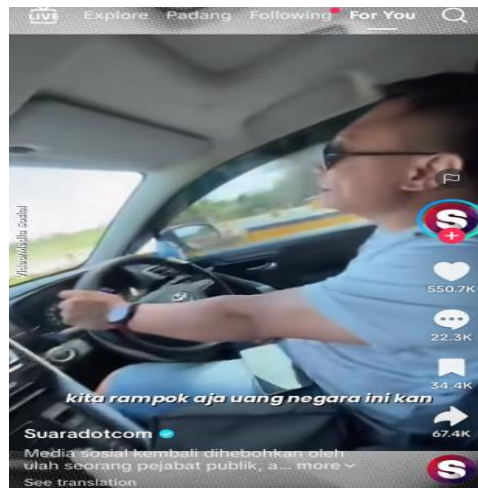
- Mengkritik keras gagasan *zero mining* yang dianggap tidak realistis terhadap kondisi Indonesia.
- Menunjukkan penolakan tegas dan mempertegas posisi beliau dalam debat publik mengenai energi dan sumber daya alam.
- Menyampaikan penilaian bahwa usulan tersebut tidak rasional, karena Indonesia masih bergantung pada sektor pertambangan.
- Menggugah perhatian publik dengan bahasa langsung dan vulgar agar isu tersebut diperhatikan.
- Membangun konstruksi wacana bahwa kebijakan ekstrem (*zero mining*) dapat merugikan negara atau tidak *feasible*.



Teori:

1. Tindak tutur: (ekspresif) mengekspresikan ketidaksukaan dan penolakan, (perlokusi) memengaruhi publik supaya menganggap gagasan zero mining tidak layak diterapkan
2. Agresi verbal: ucapan “goblok” adalah bentuk agresi verbal karena; menyerahg kapasitas intelektual pendukung kebijakan, digunakan untuk mendominasi percakapan, memojokkan lawan argumen
3. Kebijakan publik: Usulan ekstrem seperti zero mining sering dianggap infeasible karena bertentangan dengan kondisi ekonomi negara. Penolakan Gus Ulil merupakan representasi dari perspektif realistik-pragmatis dalam perumusan kebijakan

Data 5



Gambar 5. Data 5

Transkrip: “Kita habiskan uang negara ini supaya semakin miskin”

KBBI:

1. Uang negara: Dana yang bersumber dari APBN/APBD
2. Miskin: Tidak berharta; serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah)

Pragmatik: Ujaran bersifat sarkastik atau ironis, tetapi menimbulkan kesan negatif karena berkaitan dengan penyalahgunaan uang negara.

Situasi dan kondisi: Terjadi dalam konteks pembicaraan anggota DPRD tentang penggunaan anggaran saat perjalanan dinas ke Makassar.

Tujuan:

- Bisa sebagai candaan internal atau sindiran, tetapi tetap menciptakan citra negatif.
- Ujaran memperlihatkan posisi kuasa pembicara terhadap anggaran negara.

Teori:

- Tindak Tutur Ekspresif: mengungkapkan sikap atau emosi (sarkas) terkait uang negara.
- Analisis Wacana Kritis (AWK): menunjukkan relasi kuasa, di mana pejabat berbicara seolah uang negara dapat digunakan sesuka hati.
- Representasi (*Hall*): membingkai penggunaan uang negara sebagai sesuatu yang bisa “dihabiskan”, sehingga membentuk citra pejabat yang tidak sensitif terhadap kondisi rakyat.



Data 6



Gambar 6. Data 6

Transkrip: “Makan uang haram kecil-kecil, okelah”

KBBI:

1. Makan (idiom): menggunakan atau mengambil sesuatu untuk kepentingan pribadi
2. Haram: dilarang menurut aturan agama atau norma

Pragmatik: Ujaran ini bersifat sarkastik atau ironis, yang menyoroti sikap permisif terhadap tindakan mengambil uang haram dalam jumlah kecil, sehingga menimbulkan kesan negatif karena membenarkan perilaku yang tetap merupakan pelanggaran moral.

Situasi dan kondisi :

- Ujaran ini disampaikan dalam konteks pembicaraan informal, menyangkut praktik koruptif atau “uang haram” dalam jumlah kecil, oleh individu yang memiliki posisi kekuasaan (anggota DPR RI).
- Meski bernada candaan, ujaran memiliki dampak sosial karena menyangkut penggunaan dana secara ilegal oleh pejabat publik

Tujuan:

1. Humor atau candaan untuk mencairkan suasana.
2. Sarkas/ironi terhadap praktik penyimpangan dana.
3. Normalisasi tindakan ilegal kecil → membuatnya terdengar seolah tidak berbahaya.
4. Menegaskan posisi kuasa, yaitu pejabat yang merasa mampu berbicara bebas terkait isu korupsi.

Teori:

1. Tindak Tutur Ekspresif: Termasuk tindak tutur ekspresif karena mengekspresikan sikap/*judgment* pembicara mengenai uang haram.
2. Implikasi: menyepelkan praktik korupsi kecil. Melanggar maksim kualitas karena mengatakan sesuatu yang jelas tidak benar untuk tujuan humor/sarkasme.
3. Representasi: Dalam teori representasi, bahasa tidak hanya menggambarkan dunia, tetapi membentuk realitas sosial.



Data 7



Gambar 7. Data 7

Transkrip: “Kalimantan tempat jin buang anak”

KBBI:

1. Jin: makhluk halus yang tidak kasatmata
2. Buang anak (ungkapan): perbuatan membuang sesuatu di tempat terpencil/terasing dalam konteks bahasa, ungkapan ini digunakan untuk menyebut tempat yang sangat jauh, sepi, terpencil, atau tidak layak huni.

Pragmatik: Ujaran ini bersifat hiperbolis dan stereotipikal, yang secara implisit merendahkan suatu wilayah dengan menggambarkannya sebagai tempat terpencil, angker, atau tidak layak dihuni. Secara pragmatik, ucapan ini menimbulkan kesan negatif karena memperkuat stigma terhadap Kalimantan dan penduduknya.

Situasi dan kondisi :

- dalam konteks kritik terhadap rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan,
- melalui video YouTube yang kemudian viral,
- disampaikan dengan gaya retorik, provokatif, dan emosional,
- oleh tokoh publik yang sedang mengomentari kebijakan negara.

Tujuan:

- Melebih-lebihkan / hiperbola untuk menunjukkan penolakan terhadap pemindahan IKN.
- Membangun citra negatif bahwa Kalimantan adalah tempat yang tidak layak untuk dijadikan ibu kota.
- Mempengaruhi publik agar meragukan kebijakan pemerintah.
- Mencari efek emosional (shock effect) agar pernyataannya mendapat perhatian.

Teori:

1. Tindak Tutur Ekspresif : karena penutur mengekspresikan penilaian negatif terhadap Kalimantan. Bentuknya berupa ejekan, hiperbola, dan devaluasi tempat.
2. Sarkasme : Kalimantan dianggap terpencil, buruk, tidak layak dijadikan ibu kota. Melanggar Maksim Kualitas (mengatakan sesuatu yang tidak sesuai fakta), digunakan untuk tujuan retorik. Menghasilkan efek penghinaan (derogatory meaning).



3. Representasi : Bahasa membentuk cara pandang kita tentang tempat/kelompok tertentu. Ungkapan ini merepresentasikan Kalimantan sebagai tempat “liar, jauh, dan tidak beradab”. Membingkai wilayah itu secara negatif di benak publik.

Data 8



Gambar 8. Data 8

Transkrip : “Tunjangan rumah DPR naik”

KBBI:

1. Tunjangan: tambahan pendapatan di luar gaji sebagai hak atau fasilitas
2. Rumah: tempat tinggal
3. Naik: bertambah, meningkat jumlahnya

Pragmatik:

- Menyiratkan pembenaran atau normalisasi dari pihak yang diuntungkan
- Menimbulkan kesan negatif berupa arogansi, ketidakpekaan, atau ketidakpedulian terhadap sensitivitas publik.

Situasi dan kondisi :

- Ujaran muncul ketika kondisi ekonomi rakyat melemah, misalnya inflasi tinggi, daya beli turun, banyak sektor mengalami hambatan finansial.
- Pada saat yang sama, pemerintah/legislator mengumumkan penambahan tunjangan, sehingga menimbulkan jarak sosial antara pejabat dan rakyat.
- Ujaran ini sering muncul dalam liputan media dan memicu reaksi publik berupa kritik, sinisme, dan distrust terhadap lembaga legislatif.

Tujuan:

- Mengumumkan perubahan kebijakan terkait fasilitas anggota DPR.
- Menormalisasi kenaikan tunjangan sebagai keputusan administratif.
- Memberikan kesan tentang adanya ketimpangan antara elit dan masyarakat kecil, terutama ketika konteks ekonomi sedang sulit.



Teori:

1. Tindak Tutur Representatif : Ujaran ini melaporkan fakta atau klaim kebijakan, tetapi efek pragmatismenya bisa menimbulkan evaluasi negatif dari pendengar karena konteks sosialnya.
2. Representasi: DPR adalah kelompok elit dengan akses fasilitas meningkat, rakyat berada pada situasi ekonomi buruk, sehingga memunculkan citra ketidakadilan dan ketidakseimbangan kesejahteraan.
3. Sosial : dalam situasi krisis ekonomi, makna yang muncul bukan sekadar “kenaikan tunjangan”, tetapi ketidakpekaan sosial.

Data 9



Gambar 9. Data 9

Transkrip: “Buat apa demo”

KBBI:

- Buat apa; untuk apa; apa tujuannya: mempertanyakan kegunaan atau alasan
- Demo; demonstrasi: pernyataan protes atau ekspresi pendapat di muka umum, biasanya dilakukan oleh sekumpulan orang

Pragmatik: Pernyataan tersebut menimbulkan kesan negatif karena memperlihatkan sikap tidak responsif, tidak demokratis, dan mengabaikan fungsi demonstrasi sebagai kontrol sosial terhadap pemerintah.

Situasi dan kondisi :

- Ucapan muncul saat konferensi pers, di mana Annisa Maharani merespons kritik atau protes publik.
- Pada saat itu masyarakat sedang menyuarkan ketidakpuasan melalui demonstrasi.
- Konteks sosial politik: demonstrasi adalah bentuk hak kebebasan bersuara, sementara ujaran ini menilai atau meremehkan tindakan tersebut.
- Kondisi ini menempatkan pembicara (pejabat/figur publik) di posisi otoritas, sedangkan massa demonstran berada di posisi kelompok yang menuntut perubahan.

Tujuan:

- Mengarahkan publik agar tidak melakukan demonstrasi, atau meminimalkan urgensinya.



- Menilai aksi demo sebagai sesuatu yang tidak berguna, tidak tepat, atau tidak perlu.
- Membangun framing bahwa demonstrasi tidak akan menyelesaikan masalah.

Teori:

- Ekspresif: menunjukkan penilaian negatif terhadap aksi demonstrasi.
- Direktif: secara implisit mengajak publik untuk menghentikan atau meragukan efektivitas demo dalam bentuk pertanyaan retorik yang sebenarnya bukan meminta jawaban.
- Pertanyaan retorik ini memiliki makna tersirat bahwa demo tidak ada gunanya, merupakan sebuah bentuk penyangkalan terhadap aspirasi publik.

Data 10



Gambar 10. Data 10

Transkrip: “woi anjing, gak ada otak kalian monyet”

KBBI:

1. Anjing: binatang menyusui yang biasa dipelihara, galak, suka menggonggong; *Canis familiaris*.
2. Otak: bagian tubuh yang lunak yang terdapat di dalam rongga tengkorak, berfungsi sebagai pusat saraf dan pusat pengendalian seluruh kegiatan tubuh.
3. Monyet: binatang menyusui yang pandai melompat, banyak hidup di hutan; kera.

Situasi dan kondisi:

- Peristiwa terjadi ketika anggota DPRD Kota Sungai Penuh, Jambi (Fahrudin) memarahi pekerja proyek.
- Suasanaanya tegang, disertai emosi tinggi.
- Relasi kuasa: pejabat publik di atas pekerja lapangan. ini menempatkan pembicara pada posisi dominan sehingga tuturannya memiliki daya tekan.
- Kemungkinan dipicu oleh ketidakpuasan terhadap pekerjaan proyek, keterlambatan, atau kualitas kerja yang dianggap tidak sesuai.

Tujuan:

- Pembicara mengekspresikan kemarahan secara langsung
- Ia menyampaikan penilaian bahwa pekerja dianggap “tidak berpikir” atau “bodoh”.
- sengaja mempermalukan atau menyerang muka



Teori:

- Tindak Tutur : Pembicara mengekspresikan emosi kuat berupa kemarahan dan penghinaan. Mengandung maksud memerintah dengan gaya intimidatif agar pekerja mematuhi pembicara.
- Representasi: Ujaran ini membangun representasi pekerja sebagai “makhluk rendah” (anjing/monyet). Pejabat diposisikan sebagai otoritas yang berhak memarahi dan menghinakan.
- Kekerasan Simbolik : Bahasa dipakai sebagai alat kekuasaan untuk mendominasi kelompok lain. Makian dari pejabat kepada pekerja adalah bentuk kekerasan simbolik.

Data 11



Gambar 11. Data 11

Transkrip: “Jadi anggota DPR gak perlu pintar dan berkompeten, cukup banyak modal”

KBBI:

1. Pintar: cerdas, mampu berpikir baik.
2. Berkompeten: memiliki keahlian.
3. Modal: sumber (umumnya uang) untuk melakukan sesuatu.

Pragmatik: Pembeneran atau pengakuan diri bahwa keanggotaan DPR lebih ditentukan oleh uang atau modal, bukan oleh kemampuan atau kompetensi.

Situasi & Kondisi : Muncul dari kritik publik terhadap DPR, dipicu ketidakpuasan atas kinerja atau reputasi politik yang dianggap tidak berdasarkan kompetensi.

Tujuan:

- Menghina kompetensi anggota DPR.
- Menegaskan stigma bahwa jabatan diperoleh lewat uang.
- Mengajak publik untuk ikut mengejek.

Teori:

- *Hate Speech – Degrading Speech*: menyerang kelompok profesi DPR.
- *Implikatur Grice*: maksudnya DPR dianggap tidak kompeten.
- *AWK (Fairclough)*: menggugat legitimasi lembaga DPR.
- *Representasi (Hall)*: membentuk citra negatif DPR yaitu, tidak layak dipercaya.



Data 12



Gambar 12. Data 12

Transkrip: “Inilah pentingnya gizi di 1000 hari pertama, guys”

KBBI:

1. Gizi: zat penting untuk perkembangan tubuh.
2. 1000 hari pertama: fase emas perkembangan otak.

Pragmatik: metafora untuk menyindir kecerdasan tokoh.

Situasi & Kondisi : Komentar muncul karena perilaku tokoh dinilai “kurang cerdas” atau aneh dalam video.

Tujuan:

- Menyindir tingkat kecerdasan tokoh.
- Mengkritik secara tidak langsung dengan metafora.
- Mengajak publik melihat tokoh sebagai tidak kompeten.

Teori:

- *Hate Speech – Insulting Speech*: menyerang aspek kognitif.
- *Implikatur Grice*: maksudnya tokoh tidak berkembang optimal.
- *AWK*: mengonstruksi hierarki “yang cerdas vs yang tidak”.
- *Representasi (Hall)*: membangun citra tokoh tidak cerdas → tidak layak dipercaya.

Data 13



Gambar 13. Data 13



Transkrip: “Bapak mau gak, di bayar pakai pahala?”

KBBI:

1. Bapak: sebutan untuk ayah; juga sapaan hormat untuk laki-laki yang lebih tua/berwibawa (sering dipakai ke atasan).
2. Bayar/Dibayar: memberi uang sebagai upah/imbalan; menerima pembayaran.
3. Pahala: ganjaran dari Tuhan atas perbuatan baik.

Pragmatik:

- Pertanyaan retorik dan sindiran/ironi. Secara literal bertanya, tapi maksudnya: “Masa kerja dibayar pakai ‘pahala’ doang, bukan uang?”
- Metafora “pahala” dipakai untuk menyindir pihak yang dianggap pelit/mengeksploitasi (mis. atasan/penyelenggara/acara) dengan dalih “ikhlas” atau “nanti dapat pahala”.

Situasi & Kondisi:

- Komentar biasanya muncul saat ada konteks orang bekerja tapi tidak dibayar layak, atau ada pihak yang memberi alasan “demi kebaikan/amal” untuk menggantikan upah uang.
- Penonton menilai ada ketidakadilan: tenaga nyata dibalas dengan “imbalan moral/agama” saja.

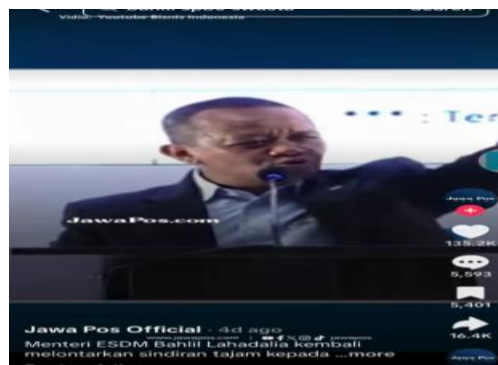
Tujuan:

- Mengkritik praktik tidak membayar/menekan pekerja secara halus tapi menusuk.
- Membongkar ketimpangan: yang kerja butuh uang, tapi yang berkuasa minta “ikhlas”.
- Memancing kesadaran publik bahwa “pahala” tidak bisa menggantikan hak upah.

Teori:

- Implikatur Grice: maksud tersiratnya: upah seharusnya uang; kalau “pahala” dijadikan pembayaran, itu tidak masuk akal dan tidak adil.
- Tindak tutur (*Speech Act*): bentuknya tanya, fungsinya menyindir/menegur (kritik tidak langsung).
- AWK (Analisis Wacana Kritis): mengungkap relasi kuasa “pemberi kerja/yang punya otoritas” vs “pekerja”; bahasa religius dipakai sebagai alat legitimasi untuk menormalisasi ketidakadilan.
- Representasi (*Hall*): membangun citra pihak yang dituju sebagai tidak bertanggung jawab/eksploitatif, sementara pekerja diposisikan sebagai pihak yang dirugikan.

Data 14



Gambar 14. Data 14



Transkrip: “Kemarin ada swasta enggak mau beli minyak. Nanti pompanya enggak ada, malah jual tukang pijit, jual es. Ya sudah, bikin saja jasa pijit sampai mati pun jadi tukang pijit. Apa urusannya sama saya?”

KBBI:

1. Swasta: badan usaha nonpemerintah.
2. Minyak: bahan bakar minyak (BBM).
3. Pompa: alat pengisian BBM di SPBU.
4. Jual: kegiatan menawarkan barang/jasa untuk memperoleh uang.
5. Tukang pijit / jasa pijit: pekerjaan di bidang jasa pemijatan.
6. Urusan: perkara atau tanggung jawab seseorang.

Pragmatik:

- Tuturan bersifat sindiran dan ekspresif. Ungkapan “jual es” dan “jadi tukang pijit” adalah hiperbola untuk merendahkan pilihan usaha swasta yang menolak membeli BBM.
- Kalimat “Apa urusannya sama saya?” menunjukkan *penolakan tanggung jawab* dan sikap tidak peduli terhadap keputusan bisnis pihak swasta.

Situasi dan kondisi:

- Disampaikan oleh Menteri ESDM dalam forum publik terkait persoalan distribusi BBM dan peran SPBU swasta.
- Bahasa informal dan keras digunakan, lalu menjadi viral karena disebarluaskan melalui TikTok.

Teori:

- Teori Tindak Tutur (*Austin–Searle*): tindak tutur ekspresif dan kritik implisit.
- Teori Kesantunan (*Brown & Levinson*): mengandung *face-threatening act* terhadap pihak swasta

Data 15



Gambar 15. Data 15

Transkrip: “tangkap Anies”

KBBI:

1. Tangkap: menahan/mengambil seseorang karena dianggap bersalah.
2. Anies: nama tokoh yang dituju dalam komentar.



Pragmatik: seruan agresif, bersifat imperatif.

Situasi & Kondisi : Muncul dalam konteks polarisasi politik dan ketidakpuasan ekstrem terhadap tokoh tertentu.

Tujuan:

- Mendesak tindakan represif pada tokoh.
- Menyebarkan sentimen negatif.
- Menghasut publik untuk ikut mendukung tindakan pemaksaan.

Teori:

- *Hate Speech – Coercive/Threatening Speech*: ujaran berat.
- Tindak Tutur Direktif (Perintah): memerintah orang untuk bertindak.
- AWK: membangun wacana bahwa tokoh bersalah meski tanpa bukti.
- Representasi (Hall): mengonstruksi citra bahwa tokoh pantas ditangkap.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa oleh pejabat publik di media sosial, khususnya TikTok, menunjukkan kecenderungan pelanggaran etika komunikasi melalui diksi bermuatan ujaran kebencian, seperti penghinaan, pelabelan, sarkasme, dan dehumanisasi. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen kekuasaan yang mereproduksi relasi sosial yang timpang antara pejabat publik dan masyarakat. Karakteristik media sosial yang viral memperbesar dampak ujaran tersebut, sehingga berpotensi menurunkan kualitas komunikasi politik, memperkuat polarisasi sosial, serta mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan.

Oleh karena itu, pejabat publik perlu meningkatkan kesadaran etis dalam berbahasa di ruang digital, didukung oleh penguatan regulasi etika komunikasi serta peningkatan literasi digital. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek dan pendekatan kajian guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap praktik bahasa pejabat publik di media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adijaya, N., Lustyantje, N., & Iskandar, I. (2023). *Ralat Bahasa Kasar pada Sosial Media: Stilistika atau Ujaran Kebencian?*
- Afif, M. F. A., Nurhamidah, Y., & Mashuri, M. F. (2021). Kematangan emosi dalam perilaku ujaran kebencian pada kebijakan politik. *Cognicia*, 9(1), 25–30.
- Imroatul Awaliyah, N., & Khasanah, H. (2025). Hate Speech in the Comments Column of the @dpr_ri Instagram Post Regarding the Post “Statement of Apology and Condolences from the Speaker of the Indonesian House of Representatives.” *Jurnal Pembelajaran Bahasa Dan Sastra*, 4(6).
- Munawaroh, U. N. (2025). Gamifikasi dan Platform Digital dalam Pengembangan Literasi Abad 21 Siswa SMP. *Jurnal Buana Kata: Pendidikan, Bahasa, Dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 3, No.1.
- Pernando, A. N., Kyo Kae Saniro, R., Kamila Aulia, C. F., Yumna Faridah, S., Diani Yustian, S., Azzahra, M., Lara Oktavia, F., & Novyta Sary, F. (2024). Analisis Penggunaan Diksi Dalam Konteks Ujaran Kebencian Pada Komentar Di Media Sosial Instagram Pada Akun @Arie_Rieyanthie. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Bahasa*, 4.



- Putra, V. G. R., Febriyatko, A., & Busri, H. (2024). Hate Speech in Instagram Comments of DPR RI: A Forensic Linguistic Analysis. *KEMBARA Journal of Scientific Language Literature and Teaching*, 10(1), 173–196.
- Rahman, F. (2025). Demokrasi Digital dan Ujaran Kebencian: Antara Kebebasan Berekspresi dan Represi Politik. *MEDIASI Jurnal Kajian Dan Terapan Media, Bahasa, Komunikasi*, 6(3).
- Suryani, Y., Istianingrum, R., & Hanik, S. U. (2021). Linguistik Forensik Ujaran Kebencian terhadap Artis Aurel Hermansyah di Media Sosial Instagram. *BELAJAR BAHASA: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 6(1), 107–118.
- Ulfah, A. N., & Anam, M. K. (2020). Analisis Sentimen Hate Speech Pada Portal Berita Online Menggunakan Support Vector Machine (SVM). 7(1), 1–10.
- Umroh, F. (2019). Ujaran Kebencian (Hate Speech) Pada Jejaring Media Sosial.
- Winelda, D. D., Kyo, R., Saniro, K., Fauziah, F., Syanmid, G., Wulandari, A., Fhadhillah Akbar, M., Triazhani, A. L., & Biyentami, V. K. (2024). Analisis Komentar Pulen Dan Tobrut Di Media Sosial Pada Akun Tiktok @Spotifyid Terhadap Penyanyi Bernadya Melalui Perspektif Bahasa Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Bahasa*, 4.
- Waruwu, O. (2025). *HAGA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Critical Discourse Analysis Of Hate Speech On Instagram: A Politician's Educational Documents In Indonesia*, 2025.